

LAPORAN

KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2026



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN YOGYAKARTA

Kata Pengantar

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi.

Balai Diklat Keuangan Yogyakarta sebagai salah satu instansi pemerintah juga tidak terlepas dari kewajiban tersebut. Laporan Kinerja Balai Diklat Keuangan Yogyakarta merupakan pemenuhan atas kewajiban tersebut sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Melalui laporan kinerja ini, diuraikan rencana kinerja, pencapaian kinerja, serta realisasi anggaran sepanjang triwulan I tahun 2026. Semoga bermanfaat bagi kalangan luas, terutama pihak-pihak yang terkait.

Yogyakarta, April 2026
Kepala Balai,



Ditandatangani secara elektronik
Endang Widajati

Ringkasan Eksekutif

Sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79/PMK.01/2022 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keuangan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mengukur pencapaian dan kualitas kinerja tahun 2026, Balai Diklat Keuangan Yogyakarta telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pada triwulan I tahun 2026 dari 13 (tiga belas) IKU yang dimiliki, seluruh IKU memiliki realisasi melebihi target yang ditetapkan di awal tahun (capaian berstatus hijau). Namun, realisasi dua IKU (Indeks kepercayaan *stakeholders* dan Indeks kualitas sistem pengendalian internal (SPI) terintegrasi) belum ada karena perhitungan dari Itjen belum tersedia hingga laporan ini disusun. Berikut rincian dari ketiga belas IKU tersebut.

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi	Target
1.	Indeks kepercayaan <i>stakeholders</i>	N/A	100
2.	Tingkat implementasi pembelajaran yang berkualitas tinggi	114,95%	100%
3.	Tingkat efektivitas pengelolaan akreditasi program pembelajaran	120%	100%
4.	Tingkat asistensi <i>learning organization</i>	120%	100%
5.	Tingkat pemenuhan standar kualitas pembelajaran	120%	100%
6.	Indeks pelaksanaan program unggulan BDK Yogyakarta	120	100
7.	Tingkat optimalisasi proses bisnis manajemen pengetahuan	120%	100%
8.	Tingkat kualitas pengembangan kompetensi SDM BDK Yogyakarta	120%	100%
9.	Tingkat implementasi <i>learning organization</i> BDK Yogyakarta	120%	100%
10.	Tingkat implementasi pembinaan mental Kementerian Keuangan	120%	100%
11.	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015, BMN, dan pengadaan	120	100
12.	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	110	100
13.	Indeks kualitas sistem pengendalian internal (SPI) terintegrasi	N/A	100



Dalam rangka mewujudkan strategi dan pencapaian kinerja periode triwulan I tahun 2026, BDK Yogyakarta memiliki total pagu anggaran sebesar Rp4.315.448.000. Sampai dengan triwulan I tahun 2026, realisasi anggaran secara keseluruhan sebesar Rp589.004.073 (13,65% dari total pagu anggaran). Rincian realisasi anggaran menurut kegiatan sampai dengan triwulan I tahun 2026 sebagai berikut.

Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	2.686.936.000	510.037.523	18,98%
Pengelolaan Organisasi dan SDM	1.628.512.000	78.966.550	4,85%
Total	4.315.448.000	589.004.073	13,65%



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Balai Diklat Keuangan Yogyakarta disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi sepanjang triwulan I tahun 2026 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi organisasi. Laporan Kinerja dapat digunakan sebagai upaya perbaikan untuk meningkatkan kinerja Balai Diklat Keuangan Yogyakarta.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.01/2022 Tanggal 18 April 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Balai Diklat Keuangan Yogyakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan melalui Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

1.2 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79/PMK.01/2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan terhitung mulai tanggal 18 April 2023 Balai Pendidikan dan Keuangan memiliki struktur organisasi baru.

Tugas pokok dan fungsi Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sebagaimana tercantum di Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 79/PMK.01/2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Balai Diklat Keuangan mempunyai tugas untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

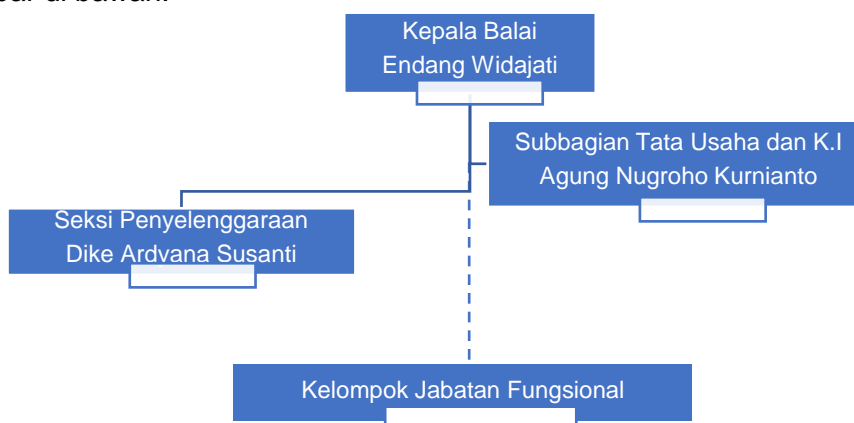
Adapun fungsi Balai Diklat Keuangan Yogyakarta meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. pemberian dukungan teknis pelaksanaan analisis kebutuhan pembelajaran di wilayah kerja Balai Diklat Keuangan;



2. penyelenggaraan pembelajaran dan fasilitas implementasi sistem pembelajaran di bidang keuangan negara;
3. pemberian dukungan teknis pelaksanaan evaluasi pembelajaran di bidang keuangan negara di wilayah kerja Balai Diklat Keuangan;
4. pemberian dukungan teknis pelaksanaan sertifikasi dan uji kompetensi;
5. penerapan proses manajemen pengetahuan dan organisasi pembelajaran di lingkungan Balai Diklat Keuangan;
6. pelaksanaan asistensi penerapan proses manajemen pengetahuan dan organisasi pembelajar di wilayah kerja Balai Diklat Keuangan;
7. penyusunan rencana kerja dan anggaran Balai Diklat Keuangan;
8. pengelolaan data dan informasi, kinerja dan risiko di lingkungan Balai Diklat Keuangan;
9. pengelolaan komunikasi publik di lingkungan Balai Diklat Keuangan;
10. pelaksanaan manajemen mutu pembelajaran di lingkungan Balai Diklat Keuangan;
11. pemantauan pengendalian intern dan kepatuhan internal terhadap kode etik dan disiplin di lingkungan Balai Diklat Keuangan;
12. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan pemberian rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Balai Diklat Keuangan;
13. pengembangan sumber daya manusia Balai Diklat Keuangan;
14. pelaksanaan administrasi Balai Diklat Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79/PMK.01/2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Balai Diklat Keuangan Yogyakarta memiliki satu Jabatan Eselon III, dua Jabatan Eselon IV, serta jabatan fungsional. Struktur organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta secara lengkap dapat dilihat dalam **Gambar 1.1**. seperti terlihat dalam gambar di bawah.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai Diklat Keuangan Yogyakarta



1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal

Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran, urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana, pengelolaan perpustakaan, fasilitasi dukungan teknis layanan pembelajaran, penerapan proses manajemen pengetahuan dan organisasi pembelajar, pengelolaan komunikasi publik, pengelolaan data dan informasi, kinerja dan risiko, pelaksanaan penjaminan mutu layanan pembelajaran, pemantauan pengendalian *intern* dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, serta pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan pemberian rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Balai Diklat Keuangan.

2. Seksi Penyelenggaraan

Seksi Penyelenggaraan Pembelajaran mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pembelajaran terkait keuangan negara, fasilitasi implementasi sistem pembelajaran, dan fasilitasi dukungan teknis pelaksanaan AKP, evaluasi pembelajaran, sertifikasi, dan uji kompetensi, serta penyelenggaraan layanan asistensi penerapan proses manajemen pengetahuan dan organisasi pembelajar di wilayah kerja Balai Diklat Keuangan.

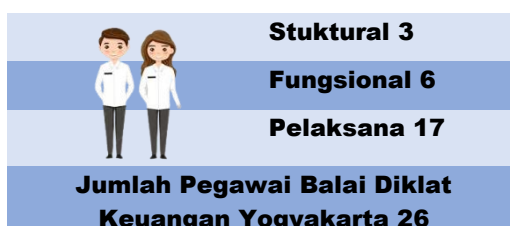
3. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional Widyaiswara memiliki tugas pokok mendidik, mengajar, dan/atau melatih Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Lembaga Diklat Pemerintah masing-masing. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Widyaiswara harus mendapatkan penugasan secara tertulis dari pimpinan lembaga diklat pemerintah yang bersangkutan dan dengan mengacu pada peraturan-peraturan terkait dengan jabatan fungsional Widyaiswara.

Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN yang selanjutnya disebut dengan Pranata Keuangan APBN adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Balai Diklat Keuangan Yogyakarta didukung oleh pegawai yang terdiri dari satu pejabat administrator, dua pejabat pengawas, lima pejabat fungsional (Widyaiswara), satu pejabat fungsional keuangan dan pelaksana sebanyak 17 pegawai.

Diagram 1.1 Data Pegawai Balai Diklat Keuangan Yogyakarta





1.3 Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja BDK Yogyakarta triwulan I tahun 2026 ini adalah sebagai berikut.

Bab I. Pendahuluan

Dalam bab ini disajikan latar belakang disusunnya Laporan Kinerja; tugas, fungsi, dan struktur organisasi BDK Yogyakarta; dan sistematika laporan.

Bab II. Perencanaan Kinerja

Bab ini berisi perencanaan strategis; penyusunan perjanjian kinerja tahun 2026; manajemen risiko; dan anggaran BDK Yogyakarta.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Bab ini memuat capaian Indikator Kinerja Utama; realisasi anggaran; dan kinerja lain-lain.

Bab IV. Penutup

Dalam bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja BDK Yogyakarta selama triwulan I tahun 2026.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu perangkat manajemen dalam memandang masa depan dan melihat peluang atau tantangannya untuk mencapai visi dan menjalankan misi organisasi. Perencanaan strategis tidak hanya memperkirakan kejadian masa depan, namun juga mempengaruhi masa depan melalui mobilisasi sumber daya dan kegiatan.

Perencanaan strategis akan diimplementasikan oleh organisasi beserta seluruh pegawai di dalamnya dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi dengan memperhatikan faktor internal dan lingkungan strategis. Rencana strategis Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta sebagai unit pelaksana teknis Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan meliputi visi, misi, kegiatan, dan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

1. Visi Organisasi

Balai Diklat Keuangan Yogyakarta memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan para pegawai Kementerian Keuangan khususnya di daerah memiliki kemampuan yang memadai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam menjalankan peran tersebut, Balai Diklat Keuangan Yogyakarta menetapkan visi “menjadi pengelola diklat terunggul dan dipercaya masyarakat dalam menghasilkan manusia yang profesional di bidang keuangan negara di daerah”.

2. Misi Organisasi

Dalam menunjang tercapainya visi tersebut, Balai Diklat Keuangan Yogyakarta menetapkan misi sebagai berikut:

- 1) meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang keuangan negara di daerah melalui pendidikan dan pelatihan.
- 2) senantiasa memperbarui diri melalui proses organisasi belajar (*learning organization*) sesuai dengan dinamika lingkungan internal dan eksternal.
- 3) berpartisipasi dalam mengembangkan masyarakat yang sadar keuangan negara.

2.2 Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Strategy map atau peta strategi adalah sebuah diagram yang menunjukkan visi, misi dan strategi organisasi yang diimplementasikan dalam aktivitas sehari-hari pada setiap unit bisnis. Dalam meningkatkan penyelenggaraan proses bisnisnya Balai Diklat Keuangan Yogyakarta



merumuskan peta strategi yang nantinya akan diimplementasikan oleh semua jajaran dalam rangka mencapai visi dan misi. Berikut adalah peta strategi Balai Diklat Keuangan Yogyakarta.

Diagram 2.1 Peta Strategi Balai Diklat Keuangan Yogyakarta



1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Diklat Keuangan Yogyakarta

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis, Balai Diklat Keuangan Yogyakarta menyusun perjanjian kinerja yang secara rinci dapat di lihat pada **Tabel 2.2**.



Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2026

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	SDM keuangan negara yang agile dan berintegritas	1a-CP Indeks kepercayaan stakeholders	100
		1b-CP Tingkat implementasi pembelajaran yang berkualitas tinggi	100%
		1c-CP Tingkat efektivitas pengelolaan akreditasi program pembelajaran	100%
		1d-N Tingkat asistensi learning organization	100%
2	Pembelajaran yang berkualitas tinggi	2a-CP Tingkat pemenuhan standar kualitas pembelajaran	100%
		2b-N Indeks pelaksanaan program unggulan BDK Yogyakarta	100
3	Manajemen pengetahuan yang andal	3a-CP Tingkat optimalisasi proses bisnis manajemen pengetahuan	100%
4	Organisasi dan SDM yang agile	4a-N Tingkat kualitas pengembangan kompetensi SDM BDK Yogyakarta	85%
		4b-N Tingkat implementasi learning organization BDK Yogyakarta	100%
		4c-N Tingkat implementasi pembinaan mental Kementerian Keuangan	100%
5	Keuangan yang akuntabel dan BMN yang produktif	5a-CP Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015, BMN, dan pengadaan	100
6	Informasi yang andal	6a-CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100
7	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	7a-CP Indeks kualitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) terintegrasi	100

IKU *cascading* peta yang dilaksanakan tahun 2026 antara lain Indeks kepercayaan *stakeholders*, tingkat implementasi pembelajaran yang berkualitas tinggi, tingkat efektivitas pengelolaan akreditasi program pembelajaran, tingkat pemenuhan standar kualitas pembelajaran, tingkat optimalisasi proses bisnis manajemen pengetahuan, indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015, BMN, dan pengadaan, indeks efektivitas ekosistem kehumasan, dan indeks kualitas sistem pengendalian internal (SPI) terintegrasi.

Sementara IKU *noncascading* antara lain tingkat asistensi *learning organization*, indeks pelaksanaan program unggulan BDK Yogyakarta, tingkat kualitas pengembangan kompetensi SDM BDK Yogyakarta, tingkat implementasi *learning organization* BDK Yogyakarta, tingkat implementasi pembinaan mental Kementerian Keuangan

2. Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah usaha untuk mengelola risiko dengan cara memonitor sumber risiko, melacak, dan melakukan serangkaian upaya agar dampak risiko bisa diminimalisasi. Salah satu tujuan dari manajemen risiko adalah menyediakan informasi risiko bagi organisasi



sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya.

Balai Diklat Keuangan Yogyakarta tahun 2026 menetapkan lima sasaran risiko untuk dimitigasi sebagai berikut.

No	Sasaran	Risiko
1.	Penerimaan negara yang meningkat	Penghimpunan penerimaan negara belum optimal
2.	Pengeluaran negara yang bernilai tambah	Pelaksanaan program prioritas pemerintah belum efektif
3.	Pengeluaran negara yang bernilai tambah	Respon negatif atas kebijakan alokasi TKD
4.	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	Penguatan integritas pelaksanaan tugas Kemenkeu belum efektif

3. Anggaran

Program kerja Balai Diklat Keuangan Yogyakarta adalah program pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara sedangkan kegiatan Balai Diklat Keuangan Yogyakarta adalah pengembangan SDM melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keuangan negara di daerah.

Untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut Balai Diklat Keuangan Yogyakarta pada tahun anggaran 2026 memiliki alokasi anggaran sebesar Rp4.315.448.000,-. Dari jumlah pagu anggaran tersebut dialokasikan untuk lima KRO yaitu Layanan Dukungan Manajemen Internal, Layanan Sarana dan Prasarana Internal, Sarana Bidang Pendidikan, Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan, dan Layanan Dukungan Manajemen Internal.

Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2026 terdiri dari dua kegiatan sebagai berikut.

1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.686.936.000.
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.628.512.000

Berikut pembagian anggaran berdasarkan rincian *output* (RO) seperti tersaji pada **Tabel 2.3**.

Tabel 2.3 Ringkasan Anggaran Berdasarkan Jenis RO

No	Kode	Uraian	Pagu (Rp)
1	4679.EBA.105	Kerumahtangaan	155.094.000
2	4679.EBA.994	Layanan Perkantoran	2.087.864.000
3	4679.EBA.Z06	Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaan Unit	980.000
4	4679.EBB.103	Gedung/Bangunan	442.998.000
5	4683.CAA.103	Manajemen Pengetahuan	3.286.000
6	4683.DCF.102	Pembelajaran Digital	287.177.000
7	4683.DCF.103	Pembelajaran Klasikal	287.191.000



No	Kode	Uraian	Pagu (Rp)
8	4683.DCF.109	Pembelajaran Dengan Kriteria Tertentu	809.899.000
9	4683.EBA.109	AKP Kewilayahan	25.000.000
10	4683.EBA.994	Layanan Perkantoran	215.959.000
Total			4.315.448.000

Berdasarkan ND-13/MK/SJ/2025 tanggal 11 Desember 2025 hal Penajaman Anggaran Untuk Pengutamaan Prioritas Direktif Presiden TA 2026, pagu anggaran 2026 mengalami efisiensi. Penyerapan anggaran yang terealisasi sampai dengan 31 Maret 2026 adalah sebesar Rp589.004.073 atau 13,65 %.



BAB III AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN KINERJA

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sesuai Kontrak Kinerja yang telah ditetapkan Balai Diklat Keuangan Yogyakarta tahun 2026 terdapat 13 Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk 7 Sasaran Strategis. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Diklat Keuangan Yogyakarta sampai dengan periode triwulan I tahun 2026 adalah sebagaimana disajikan dalam **Tabel 3.1**.

Tabel 3.1 Target dan Capaian IKU Tahun Anggaran 2026

Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Q1	Capaian
SDM keuangan negara yang <i>agile</i> dan berintegritas	1	Indeks kepercayaan <i>stakeholders</i>	100	N/A	N/A
	2	Tingkat implementasi pembelajaran yang berkualitas tinggi	100%	114,95%	114,95
	3	Tingkat efektivitas pengelolaan akreditasi program pembelajaran	100%	120%	120
	4	Tingkat asistensi <i>learning organization</i>	100%	120%	120
Pembelajaran yang berkualitas tinggi	5	Tingkat pemenuhan standar kualitas pembelajaran	100%	120%	120
	6	Indeks pelaksanaan program unggulan BDK Yogyakarta	100	120	120
Manajemen pengetahuan yang andal	7	Tingkat optimalisasi proses bisnis manajemen pengetahuan	100%	120%	120
Organisasi dan SDM yang <i>agile</i>	8	Tingkat kualitas pengembangan kompetensi SDM BDK Yogyakarta	100%	120%	120
	9	Tingkat implementasi <i>learning organization</i> BDK Yogyakarta	100%	120%	120
	10	Tingkat implementasi pembinaan mental Kementerian Keuangan	100%	120%	120
Keuangan yang akuntabel dan BMN yang produktif	11	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015, BMN, dan pengadaan	100	120	120
Informasi yang andal	12	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100	110	110
Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	13	Indeks kualitas sistem pengendalian internal (SPI) terintegrasi	100	N/A	N/A



IKU 1. Indeks kepercayaan *stakeholders*

BDK Yogya 1a-CP		SS: SDM keuangan negara yang <i>agile</i> dan berintegritas							IKU: Indeks kepercayaan <i>stakeholders</i>
T/R		Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target		100	100	100	100	100	100	100	Max/ TLKV
Realisasi		-	-	-	-	-	-	-	
Capaian		-	-	-	-	-	-	-	

Ruang lingkup IKU Indeks kepercayaan *stakeholders* terdiri dari dua komponen, yaitu Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) dan persentase tindak lanjut atas pengaduan masyarakat pada Wise. IKU ini bertujuan untuk mengukur kepercayaan *stakeholder* kepada Kementerian Keuangan, kualitas pelayanan publik, dan kualitas penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Kementerian Keuangan.

IKU ini merupakan penyesuaian dari IKU tahun 2025 yaitu Tingkat kepuasan *stakeholder* dan pengguna layanan, dimana formula sebelumnya adalah Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan, Indeks Kepuasan Pengguna Layanan, dan tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi SKPL 2024.

Tindakan yang telah dilaksanakan pada triwulan I untuk mencapai IKU ini adalah:

1. Penyampaian Laporan Hasil Tindak Lanjut Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat triwulan IV tahun 2025 (2 April 2026);
2. Penyampaian Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat triwulan I tahun 2026 (2 April 2026).

Realisasi IKU ini belum ada karena perhitungan dari Itjen belum tersedia hingga laporan ini disusun.

IKU 2. Tingkat implementasi pembelajaran yang berkualitas tinggi

BDK Yogya 1b-CP		SS: SDM keuangan negara yang <i>agile</i> dan berintegritas							IKU: Tingkat implementasi pembelajaran yang berkualitas tinggi
T/R		Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/ TLKV
Realisasi		114,95%	-	-	-	-	-	-	
Capaian		114,95	-	-	-	-	-	-	

IKU ini bertujuan mengukur kualitas pembelajaran BPPK yang terdapat pada kalender pembelajaran dan terdiri dari pembelajaran jarak jauh, *e-learning*, dan pembelajaran klasikal. Pengukuran kualitas pembelajaran menggunakan indeks persepsi peserta yang sesuai dengan ketentuan evaluasi pembelajaran yang berlaku di BPPK, yakni Peraturan Kepala Badan Nomor 6 Tahun 2024 (Perkaban 6/2024) tentang Pedoman Manajemen Pembelajaran. IKU ini diukur dari hasil survei evaluasi peserta pembelajaran, dengan formula $70\% \times (75\% \text{ Nilai Evagara Kemenkeu} + 25\% \text{ Nilai Evagara Non-Kemenkeu}) + 30\% (75\% \text{ Nilai Evajar Kemenkeu} + 25\% \text{ Nilai Evajar Non-Kemenkeu})$.

Pada triwulan I terdapat 4 pelatihan jarak jauh, 1 pelatihan klasikal, dan 1 KCOC. Dua pelatihan diantaranya diikuti oleh peserta Kementerian Keuangan, selebihnya berasal dari perpaduan



Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga. Dari perhitungan formula di atas, hasil evaluasi peserta pembelajaran adalah 114,95%.

IKU 3. Tingkat efektivitas pengelolaan akreditasi program pembelajaran

BDK Yogya 1c-CP		SS: SDM keuangan negara yang agile dan berintegritas IKU: Tingkat efektivitas pengelolaan akreditasi program pembelajaran							
T/R		Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	PoI/KP
Target		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/ TLKV
Realisasi		128%	-	-	-	-	-	-	
Capaian		120	-	-	-	-	-	-	

Akreditasi Program Pelatihan Teknis di Bidang Keuangan Negara yang selanjutnya disebut Akreditasi Program adalah penilaian kelayakan terhadap program pelatihan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). Akreditasi Program dilaksanakan berdasarkan PerKaban Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Akreditasi Program Pelatihan di Bidang Keuangan Negara. Pengukuran IKU di Balai Diklat Keuangan Yogyakarta periode triwulan I adalah nilai kepuasan peserta sosialisasi atas kegiatan sosialisasi/pengenalan terkait akreditasi.

Balai Diklat Keuangan Yogyakarta telah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi akreditasi program kepada Balai Diklat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 4 Maret 2026 dengan nilai survei kepuasan sebesar 4,48. Rekomendasi rencana aksi pada triwulan II adalah penyusunan laporan sosialisasi/asistensi akreditasi program pembelajaran.

IKU 4. Tingkat asistensi learning organization

BDK Yogya 1d-N		SS: SDM keuangan negara yang agile dan berintegritas IKU: Tingkat asistensi learning organization							
T/R		Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	PoI/KP
Target		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/ TLKV
Realisasi		122,25%	-	-	-	-	-	-	
Capaian		120	-	-	-	-	-	-	

IKU ini merupakan IKU noncascading yang bertujuan untuk mengukur tingkat asistensi LO di lingkungan BPPK sebagai pengelola pembelajaran (melakukan asistensi ke UE1 lain diluar BPPK). Perhitungan formula dalam mencapai target IKU adalah penyelesaian penyusunan rencana kerja asistensi LO, nilai kepuasan asistensi/sosialisasi, dan realisasi jumlah kegiatan asistensi LO.

Tindakan yang telah dilaksanakan sepanjang triwulan I adalah:

1. penyampaian rencana kerja asistensi LO kepada Sekretariat Badan,
2. pelaksanaan asistensi LO kepada KPPN Yogyakarta dan KPKNL Yogyakarta pada tanggal 5 Maret 2026
3. pelaksanaan asistensi LO kepada KPPBC Yogyakarta pada tanggal 6 Maret 2026, dan
4. pelaksanaan asistensi LO kepada Kanwil di wilayah Jateng dan DIY pada tanggal 11 Maret 2026.



Rerata nilai kepuasan atas pelaksanaan asistensi LO adalah 4,98. Adapun rekomendasi rencana aksi pada triwulan II adalah pelaksanaan asistensi LO kepada satker di wilayah DIY dan survei kepuasan di triwulan II 2026.

IKU 5. Tingkat pemenuhan standar kualitas pembelajaran

BDK Yogya 2a-CP		SS: Pembelajaran yang berkualitas tinggi IKU: Tingkat pemenuhan standar kualitas pembelajaran							
T/R		Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/ TLKV
Realisasi		121,67%	-	-	-	-	-	-	
Capaian		120	-	-	-	-	-	-	

Tingkat pemenuhan standar kualitas pembelajaran mengukur tingkat kualitas penyelenggaraan pembelajaran dengan berdasar pada standar mutu pembelajaran yang berlaku di BPPK dan penyelesaian rekomendasi hasil pengukuran tahun sebelumnya. IKU ini bertujuan untuk memastikan terpenuhinya pembelajaran di lingkungan BPPK yang terstandarisasi dengan kualitas yang terjaga dalam memenuhi kepuasan peserta pembelajaran dan mencapai target kinerja unit organisasi di lingkungan Kemenkeu.

Terdapat empat komponen dalam pengukuran IKU ini, diantaranya indeks ketepatan waktu penyampaian dokumen perencanaan BDK dan Pusdiklat ke Pusbin JFPM, indeks ketepatan waktu penyampaian hasil pengendalian mutu BDK dan Pusdiklat ke Pusbin JFPM, tindak lanjut rekomendasi hasil penilaian mutu tahun 2025, dan hasil penilaian mutu.

Tindakan yang telah dilaksanakan pada triwulan I adalah:

1. penyampaian Dokumen Rencana Kerja Kegiatan Pengendalian Mutu Pembelajaran Tahun 2026 ke Pusbin JFPM;
2. penyampaian tindak lanjut rekomendasi hasil penilaian mutu tahun 2025 ke Pusbin JFPM; dan
3. penyampaian Laporan hasil pengendalian mutu BDK Yogyakarta periode triwulan I 2026 ke Pusbin JFPM.

Adapun tindakan aksi yang perlu dilakukan pada triwulan II adalah penyampaian Laporan hasil pengendalian mutu BDK Yogyakarta periode triwulan II 2026 ke Pusbin JFPM.

IKU 6. Indeks pelaksanaan program unggulan BDK Yogyakarta

BDK Yogya 2b-N		SS: Pembelajaran yang berkualitas tinggi IKU: Indeks pelaksanaan program unggulan BDK Yogyakarta							
T/R		Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target		100	100	100	100	100	100	100	Max/ TLKV
Realisasi		120	-	-	-	-	-	-	
Capaian		120	-	-	-	-	-	-	

Setiap BDK wajib menyelenggarakan minimal 3 (tiga) program, dengan ketentuan sekurang-kurangnya 2 (dua) program dipilih dari Program Unggulan Generik, dan 1 (satu) program lainnya dapat dibuat baru dari Program Unggulan Khas BDK atau ambil Program Unggulan Generik yang lain. Pengukuran IKU ini melibatkan beberapa komponen diantaranya penyusunan rencana pelaksanaan program unggulan tahun 2026, kesesuaian pelaksanaan program unggulan, dan pelaporan dan hasil evaluasi program unggulan.



Program Unggulan BDK Yogyakarta yang akan diimplementasikan diantaranya:

1. Bimtek Pengelolaan Keuangan untuk Koperasi Desa Merah Putih;
2. Bimtek Pengelolaan Keuangan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi;
3. Pelatihan juru Sita Pajak Daerah bagi Pegawai Pemda di Wilayah Kerja BDK Yogyakarta;
4. Kegiatan Bina Muda bagi Siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas; dan
5. *Roadshow* Edukasi Keuangan Negara to Campus.

Pada triwulan I, Balai Diklat Keuangan Yogyakarta telah menyampaikan KAK Program Unggulan Tahun 2026 ke Sekretariat Badan. Adapun rencana aksi pada triwulan II adalah melaksanakan kegiatan program unggulan sesuai dengan KAK yang telah disusun (dari sisi pelaksanaan kegiatan dan target peserta pelatihan) periode triwulan II.

IKU 7. Tingkat optimalisasi proses bisnis manajemen pengetahuan

BDK Yogya 3a-CP		SS: Manajemen pengetahuan yang andal IKU: Tingkat optimalisasi proses bisnis manajemen pengetahuan							
T/R		Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/ TLKV
Realisasi		120%	-	-	-	-	-	-	
Capaian		120	-	-	-	-	-	-	

IKU ini mengukur nilai implementasi manajemen pengetahuan, dengan komponen identifikasi, dokumentasi, pengorganisasian, penyebarluasan, pemanfaatan, dan pemantauan. IKU ini bertujuan untuk mengukur implementasi manajemen pengetahuan sesuai tahapan manajemen pengetahuan.

Tindakan yang telah dilaksanakan sepanjang triwulan I adalah:

1. Sosialisasi Daftar Pengetahuan Kritis pada tanggal 30 Maret 2026;
2. penyelesaian rencana agenda CoP (ND-119/BPP.05/2026) + penyusunan KEP pembentukan CoP (KEP-33, 34, 35, 36, 37, 38/BPP.05/2026); dan
3. CoP yang diimplementasikan adalah CoP Ksatria Merah Putih, NITIPRAJA, PPK, PBJ, Penguatan Pejabat Pengawas, dan PPSPM.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan II adalah penyelenggaraan kegiatan diskusi tematik terjadwal semester 1+*lesson learned*+evaluasi *value creation*.

IKU 8. Tingkat kualitas pengembangan kompetensi SDM BDK Yogyakarta

BDK Yogya 4a-N		SS: Organisasi dan SDM yang agile IKU: Tingkat kualitas pengembangan kompetensi SDM BDK Yogyakarta							
T/R		Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target		85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	Max/ TLKV
Realisasi		129,41%	-	-	-	-	-	-	
Capaian		120	-	-	-	-	-	-	
Isu Utama dan Implikasi									

IKU ini mengukur kualitas pengelolaan SDM di unit kerja masing-masing dan menjadi IKU mandatory bagi unit dengan komponen pengukuran yaitu kesesuaian AKP, monitoring Tugas Belajar (TB) mandiri, dan pengisian kuesioner Evaluasi Pasca Pembelajaran. IKU ini bertujuan



untuk mengukur komitmen pengiriman peserta pelatihan sesuai AKP dan meminimalisasi pembatalan peserta pelatihan, memastikan bahwa pegawai yang menjalani TB Mandiri dapat menyelesaikan studinya sesuai aturan dalam PMK 34 Tahun 2024, dan meningkatkan partisipasi pegawai BPPK sebagai responden epaspem.

Tindakan yang telah dilaksanakan pada triwulan I adalah:

1. mengirimkan peserta pelatihan sesuai dengan AKP; dan
2. menyampaikan Laporan Rekapitulasi Monitoring TB Mandiri ke Sekretariat Badan

Rencana aksi pada triwulan II adalah mengirim peserta pelatihan sesuai dengan AKP periode triwulan II dan menyampaikan Laporan Rekapitulasi Monitoring TB Mandiri ke Sekretariat Badan periode triwulan II.

IKU 9. Tingkat implementasi learning organization BDK Yogyakarta

BDK Yogya 4b-N		SS: Organisasi dan SDM yang agile IKU: Tingkat implementasi learning organization BDK Yogyakarta							
T/R		Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/ TLKV
Realisasi		122,25%	-	-	-	-	-	-	
Capaian		120	-	-	-	-	-	-	

IKU ini merupakan IKU *non-cascading* yang bertujuan untuk mengukur tingkat implementasi LO di lingkungan BPPK sebagai pengguna pembelajaran (penguatan implementasi LO di internal BPPK). Pengukuran IKU ini berdasarkan perhitungan beberapa komponen diantaranya: nilai kepuasan sosialisasi, penyusunan rencana kerja implementasi LO, penyusunan proposal inovasi, penyusunan Rencana Rencana Aksi Pembelajaran, penyusunan laporan implementasi inovasi, dan nilai tingkat implementasi *learning organization*,

Tindakan yang telah dilakukan sepanjang triwulan I adalah:

1. menyampaikan kertas kerja rencana kerja LO ke Sekretariat Badan pada tanggal 30 Januari 2026; dan
2. melakukan kegiatan Sosialisasi rencana kerja LO kepada internal pegawai Balai Diklat Keuangan Yogyakarta pada tanggal 5 Februari 2026 dan melakukan survei kepuasan atas kegiatan sosialisasi dimaksud dengan hasil 4,98.

Tindakan yang perlu dilaksanakan pada triwulan II adalah penyusunan proposal inovasi, dan penyusunan Rencana Rencana Aksi Pembelajaran.

IKU 10. Tingkat implementasi pembinaan mental Kementerian Keuangan

BDK Yogya 4c-N		SS: Organisasi dan SDM yang agile IKU: Tingkat implementasi pembinaan mental Kementerian Keuangan							
T/R		Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/ TLKV
Realisasi		120%	-	-	-	-	-	-	
Capaian		120	-	-	-	-	-	-	

IKU ini merupakan IKU *non-cascading* dalam rangka mewujudkan SDM Kementerian Keuangan yang memiliki karakter dan mental yang kuat berlandaskan Nilai Dasar ASN dan Nilai-Nilai



Kementerian Keuangan. Setiap unit wajib melaksanakan empat kegiatan bintang (ideologi, rohani, kompetensi, dan kejiwaan) dalam periode satu tahun.

Pengukuran IKU ini melalui beberapa komponen diantaranya jumlah pegawai yang hadir saat pelaksanaan pembinaan mental, kecepatan penyampaian laporan kegiatan pembinaan mental, dan *feedback* penilaian pelaksanaan kegiatan bintang (diselenggarakan oleh Biro SDM, Setjen pada triwulan IV).

Tindakan yang telah dilaksanakan pada triwulan I adalah:

1. pelaksanaan pembinaan mental bidang kompetensi dengan tema "Penguatan Kompetensi Melalui Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku" pada tanggal 12 Maret 2026;
2. jumlah kehadiran pegawai saat pelaksanaan pembinaan mental adalah 22 dari 26 pegawai.
3. penyampaian Laporan Pembinaan Mental Bidang Kompetensi ke Sekretariat Badan pada tanggal 16 Maret 2026.

IKU 11. Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015, BMN, dan pengadaan

BDK Yogya 5a-CP		SS: Keuangan yang akuntabel dan BMN yang produktif IKU: Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015, BMN, dan pengadaan							
T/R		Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target		100	100	100	100	100	100	100	Max/ TLKV
Realisasi		120	-	-	-	-	-	-	
Capaian		120	-	-	-	-	-	-	
Isu Utama dan Implikasi									

IKU ini mengukur komponen indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015 dan indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan. Komponen-komponen yang diukur pada indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015 adalah Indeks Kinerja Anggaran Kemenkeu (IKAK) dan Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 015, sedangkan komponen-komponen yang diukur pada indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan adalah tingkat penerimaan PNPB dari pengelolaan BMN, tingkat kualitas pengadaan proyek prioritas, dan tingkat kualitas penyelesaian penetapan status penggunaan Barang Milik Negara.

Terbitnya ND Menkeu hal Penajaman Anggaran yang memangkas pagu anggaran 2026 tentunya berdampak pada pelaksanaan kegiatan. Oleh karenanya Balai Diklat Keuangan Yogyakarta perlu menyesuaikan rencana kegiatan sesuai dengan ketersediaan anggaran, mengoptimalkan sumber daya yang ada, dan menggalakkan efisiensi dalam pengguna anggaran.

IKU 12. Indeks efektivitas ekosistem kehumasan

BDK Yogya 6a-CP		SS: Informasi yang andal IKU: Indeks efektivitas ekosistem kehumasan							
T/R		Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target		100	100	100	100	100	100	100	Max/ TLKV
Realisasi		110	-	-	-	-	-	-	
Capaian		110	-	-	-	-	-	-	

Pengukuran IKU ini berdasarkan dua komponen, yaitu pemenuhan Agenda Setting Kemenkeu dan kesesuaian Konten dan Kalender Media Sosial. Tujuan dari IKU ini adalah mengukur tingkat efektivitas komunikasi publik dalam lingkup komunikasi Kemenkeu Satu yang terkolaborasi.



Pada komponen pemenuhan Agenda Setting Kemenkeu pada triwulan I yang diukur adalah agenda setting pada bulan Februari dan Maret. Balai Diklat Keuangan Yogyakarta belum mendapatkan nilai optimal pada komponen ini karena pemenuhannya masih bersifat *repost* agenda setting. Pada triwulan II mendatang akan diupayakan untuk membuat konten mandiri per agenda setting.

IKU 13. Indeks kualitas sistem pengendalian internal (SPI) terintegrasi

BDK Yogya 7a-CP		SS: Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif IKU: Indeks kualitas sistem pengendalian internal (SPI) terintegrasi							
T/R		Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target		100	100	100	100	100	100	100	Max/ TLKV
Realisasi		-	-	-	-	-	-	-	
Capaian		-	-	-	-	-	-	-	

Pengukuran IKU ini berdasarkan dua komponen, yaitu indeks integritas organisasi, indeks kualitas penerapan SPI Terintegrasi, dan indeks kualitas pengendalian dan pengawasan real-time berbasis digital. Pada komponen tingkat keberlanjutan dan pemenuhan unit kerja terhadap kriteria Zona Integritas (ZI), Balai Diklat Keuangan Yogyakarta saat ini sedang dalam proses pembangunan untuk memenuhi kriteria predikat WBBM.

Realisasi IKU ini belum ada karena perhitungan dari Itjen belum tersedia hingga laporan ini disusun.

3.2 Penjelasan Pendukung atas Pencapaian IKU

Berbagai upaya *extra effort* telah dilakukan untuk menunjang capaian IKU pada triwulan I tahun 2026, antara lain:

- 1) penyusunan rencana kerja Asistensi *Learning Organization* dan rencana kerja Implementasi *Learning Organization*;
- 2) Sosialisasi Akreditasi Program kepada Balai Diklat Provinsi DIY dan menyebarkan survei kepuasan atas pelaksanaan sosialisasi;
- 3) melaksanakan asistensi *Learning Organization* kepada satker-satker di wilayah D.I. Yogyakarta dan menyebarkan survei kepuasan atas pelaksanaan asistensi;
- 4) menyusun rencana agenda CoP dan membuat Kep atas implementasi tiap-tiap CoP;
- 5) memastikan pengiriman peserta pelatihan sesuai dengan AKP;
- 6) menyusun rencana kerja implementasi *Learning Organization*;
- 7) menyelenggarakan kegiatan pembinaan mental dengan narasumber Kepala Balai dan dihadiri oleh lebih dari 75% pegawai;
- 8) adanya penajaman anggaran di tahun 2026, perlu menyesuaikan rencana kegiatan sesuai dengan ketersediaan anggaran, mengoptimalkan sumber daya yang ada, dan menggalakkan efisiensi dalam pengguna anggaran.



3.3 Rencana Aksi Triwulan II

Rencana aksi yang akan dilaksanakan pada triwulan selanjutnya dalam rangka pencapaian target IKU sebagai berikut:

- 1) melaksanakan asistensi *Learning Organization* kepada satker-satker di wilayah D.I. Yogyakarta dan menyebarkan survei kepuasan atas pelaksanaan asistensi;
- 2) menyampaikan laporan hasil pengendalian mutu (internal) BDK triwulan II sebelum batas waktu yang ditetapkan;
- 3) melaksanakan kegiatan program unggulan sesuai dengan KAK yang telah disusun dengan memperhatikan waktu pelaksanaan kegiatan dan target peserta pelatihan;
- 4) menyelenggarakan kegiatan diskusi tematik CoP sesuai jadwal pelaksanaan triwulan II;
- 5) menyusun proposal inovasi, menyusun Rencana Aksi Pembelajaran, dan melakukan kegiatan sosialisasi *Learning Organization* melalui metode *edutainment*.
- 6) menyelenggarakan kegiatan pembinaan mental dengan narasumber Kepala Balai dan dihadiri oleh lebih dari 75% pegawai;
- 7) menyesuaikan rencana kegiatan sesuai dengan ketersediaan anggaran, mengoptimalkan sumber daya yang ada, dan menggalakkan efisiensi dalam penggunaan anggaran; dan
- 8) Membuat konten mandiri untuk memenuhi program agenda setting.

3.4 Realisasi Keuangan

Jumlah pagu anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta sampai revisi terakhir adalah sebesar Rp4.315.448.000 yang terdiri dari pagu anggaran belanja pegawai sebesar Rp215.959.000 , pagu belanja barang sebesar Rp3.656.491.000 dan pagu belanja modal sebesar Rp442.998.000. Pagu anggaran dialokasikan untuk lima KRO yaitu Layanan Dukungan Manajemen Internal, Layanan Sarana dan Prasarana Intenal, Sarana Bidang Pendidikan, Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan, dan Layanan Dukungan Manajemen Internal. Realisasi anggaran hingga akhir triwulan I sebesar Rp589.004.073 atau 13,65 %. Secara rinci realisasi anggaran triwulan I Tahun 2026 adalah sebagaimana tersaji pada **Tabel 3.2.**

Tabel 3.2. Realisasi Anggaran Berdasarkan Output TA 2026

Kode	Kegiatan/ Output	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
4679.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2.243.938.000	454.302.009	20,25%
4679.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	442.998.000	55.735.514	12,58%
4683.CAA	Sarana Bidang Pendidikan	3.286.000	0	0,00%
4683.DCF	Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan	1.384.267.000	18.514.550	1,34%
4683.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	240.959.000	60.452.000	25,09%



Kode	Kegiatan/ Output	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Jumlah	4.315.448.000	589.004.073	13,65%

1. Layanan Dukungan Manajemen Internal

Realisasi anggaran untuk *ouput* “Layanan Dukungan Manajemen Internal” triwulan I tahun anggaran 2026 yang terdiri dari RO Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaannya Unit, RO Kerumahtangan, dan RO Layanan Perkantoran dengan realisasi sebesar Rp454.302.009 (20,25%). Informasi lebih rinci terkait dengan *output* untuk “Layanan Dukungan Manajemen Internal” dijelaskan dalam **Tabel 3.21**.

Tabel 3.21. Realisasi Anggaran Output Layanan Dukungan Manajemen Internal Triwulan I TA 2026

Komponen	Anggaran			
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	Saldo (Rp)
Kerumahtangaan	155.094.000	12.588.945	8,12%	142,505,055
Layanan Perkantoran	2.087.864.000	441.713.064	21,16%	1,646,150,936
Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaannya Uni	980.000	0	0,00%	980,000
Jumlah	2.243.938.000	454.302.009	20,25%	1,789,635,991

2. Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Sampai akhir triwulan I tahun 2026, realisasi anggaran untuk *output* “Layanan Sarana dan Prasarana Internal” adalah Rp55.735.514 (12,58%). Secara rinci realisasi anggaran untuk *output* “Layanan Sarana dan Prasarana Internal” tersebut disajikan dalam Tabel 3.22.

Tabel 3.22. Realisasi Anggaran Output Layanan Sarana dan Prasarana Internal Triwulan I TA 2026

Komponen	Anggaran			
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	Saldo (Rp)
Gedung/Bangunan	442.998.000	55.735.514	12,58%	387.262.486
Jumlah	442.998.000	55.735.514	12,58%	387.262.486

3. Sarana Bidang Pendidikan

Sampai akhir triwulan I tahun 2026, realisasi anggaran untuk *output* “Sarana Bidang Pendidikan adalah Rp0 (0,00%). Secara rinci realisasi anggaran untuk *output* “Layanan Sarana dan Prasarana Internal” tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel Realisasi Anggaran Output Sarana Bidang Pendidikan Triwulan I TA 2026

Komponen	Anggaran			
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	Saldo (Rp)
Manajemen Pengetahuan	3.286.000	0	0,00%	3.286.000
Jumlah	3.286.000	0	0,00%	3.286.000



4. Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan

Sampai akhir triwulan I tahun 2026, realisasi anggaran untuk *output* “Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan” adalah 1,34% atau sebesar Rp18.514.550 dari pagu. Secara rinci realisasi anggaran untuk *output* “Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan” tersebut disajikan dalam Tabel 3.23.

Tabel 3.23. Realisasi Anggaran *Output* Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan Triwulan I TA 2026

<i>Komponen</i>	Anggaran			
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	Saldo (Rp)
Pembelajaran Digital	287.177.000	5.500.000	1,92%	281.677.000
Pembelajaran Klasikal	287.191.000	13.014.550	4,53%	274.176.450
Pembelajaran Dengan Kriteria Tertentu	809.899.000	0	0,00%	809.899.000
Jumlah	1.384.267.000	18.514.550	1,34%	1.365.752.450

5. Layanan Dukungan Manajemen Internal

Realisasi anggaran untuk *output* “Layanan Dukungan Manajemen Internal” sampai dengan triwulan I tahun 2026 yang terdiri dari RO AKP Kewilayahan dan RO Layanan Perkantoran dengan realisasi sebesar 25,09% atau sebesar Rp60.452.000 dari pagu yang tersedia. Informasi lebih rinci terkait *output* untuk “Layanan Dukungan Manajemen Internal” dijelaskan dalam Tabel 3.24.

Tabel 3.24. Realisasi Anggaran *Output* Layanan Dukungan Manajemen Internal Triwulan I TA 2026

<i>Komponen</i>	Anggaran			
	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	Saldo (Rp)
AKP Kewilayahan	25.000.000	24.504.000	98,02%	496.000
Layanan Perkantoran	215.959.000	35.948.000	16,65%	180.011.000
Jumlah	240.959.000	60.452.000	25,09%	180.507.000

3.5 Kinerja Lain-lain

Sepanjang triwulan I tahun 2026, Balai Diklat Keuangan Yogyakarta menyelenggarakan pelatihan klasikal, pelatihan jarak jauh, dan lokakarya yang terdiri dari:

1.	PJJ Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Angkatan I (26 Jan s.d 2 Feb 2026)
2.	Pelatihan Teknis Identifikasi Keaslian Pita Cukai Angkatan VI (29 Jan s.d 12 Feb 2026)
3.	PJJ Penatausahaan Barang Milik Negara Bagi Pengguna Barang Angkatan II (2 s.d 11 Feb 2026)
4.	PJJ Pejabat Pembuat Komitmen Angkatan I (18 s.d 24 Feb 2026)
5.	PJJ Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Angkatan I (2 s.d 9 Mar 2026)

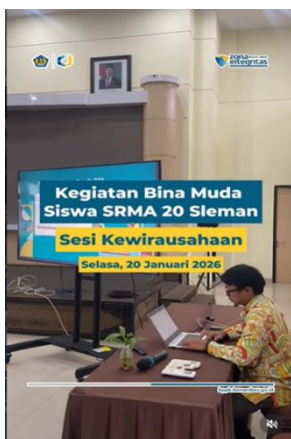


Selain itu, Balai Diklat Keuangan Yogyakarta juga menyelenggarakan berbagai kegiatan diantaranya:

1. Bina Muda Sekolah Rakyat Menengah Atas 20 Sleman

Pembinaan Karakter dan Kompetensi Generasi Muda (Bina Muda) sebagai bagian dari upaya pembinaan dan pengembangan karakter siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas 20 Sleman. Beberapa kegiatan Bina Muda yang sudah dilaksanakan pada triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

- a. Mengenal Diri dan Orang Lain pada tanggal 9 Januari 2026
- b. Tausiyah Agama dalam rangka Peringatan Isra' Mi'raj 1447 H pada tanggal 19 Januari 2026
- c. Sesi Kewirausahaan pada tanggal 20 Januari 2026
- d. Sesi Fotografi pada tanggal 22 Januari 2026



2. Angkringan Reborn

Kemenkeu *Corpu Open Class* (KCOG) Balai Diklat Keuangan Yogyakarta per triwulan III tahun 2025 dikemas dalam program Angkringan Reborn. Program Angkringan Reborn merupakan wadah berbagi berbagai pengetahuan yang dikemas menarik dengan nuansa budaya Yogyakarta dan berlatar belakang angkringan khas Yogyakarta. Berikut kegiatan KCOG dan Angkringan Reborn yang diselenggarakan Balai Diklat Keuangan Yogyakarta sepanjang triwulan I tahun 2026:

- a. Angkringan Reborn dengan tema "Cegah, Pilah, Olah: Solusi Cerdas Kelola Sampah" pada 30 Januari 2026
- b. KCOG: Lelang Hak Menikmati, Dari Nol Sampai Jago pada 13 Februari 2026





3. Webinar Strategi dan Arah Kebijakan Pengelolaan APBN dan Investasi Aman untuk Gen Z Komunitas Uang Kita Regional D.I. Yogyakarta

Kegiatan ini dilaksanakan pada 12 Maret 2026 bertujuan untuk meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai pengelolaan keuangan negara serta pentingnya literasi keuangan dalam pengambilan keputusan investasi yang bijak. Dalam webinar ini dibahas dua topik utama yaitu Strategi dan Arah Kebijakan Pengelolaan APBN serta Investasi Aman bagi Gen Z, sehingga peserta dapat memahami peran APBN dalam pembangunan sekaligus memperoleh wawasan mengenai cara berinvestasi secara cerdas dan bertanggung jawab.



4. Leader Corner

Dalam rangka memperkuat kualitas pembelajaran dan pengelolaan pengetahuan di lingkungan Kementerian Keuangan, Balai Diklat Keuangan Yogyakarta melaksanakan kegiatan *Leaders Talk (Leaders Corner)* sekaligus penggalian kebutuhan pembelajaran berbasis kewilayahan di wilayah Jawa Tengah dan DIY pada 2–4 Februari 2026 di Semarang.

Kegiatan ini bertujuan mendokumentasikan pengalaman, praktik baik, dan insight strategis para pimpinan wilayah agar tidak hilang, namun dapat menjadi sumber pembelajaran dan referensi pengembangan kapasitas ke depan.

Pendokumentasian pengetahuan pimpinan dilaksanakan bersama:

- Kepala Kanwil DJKN Provinsi Jawa Tengah dan DIY
- Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah
- Kepala Kanwil DJBC Provinsi Jawa Tengah dan DIY
- Kepala Kanwil DJP Provinsi Jawa Tengah I





5. Asistensi Learning Organization, Pembelajaran Terintegrasi, dan Manajemen Pengetahuan pada Satuan Kerja Kementerian Keuangan di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta

Kegiatan ini diselenggarakan secara daring melalui aplikasi Microsoft Teams dan luring sebagai upaya memperkuat pemahaman serta implementasi konsep organisasi pembelajar di lingkungan Kementerian Keuangan. Melalui kegiatan asistensi ini, peserta memperoleh pendampingan terkait penguatan praktik pembelajaran terintegrasi serta pengelolaan pengetahuan organisasi, sehingga diharapkan dapat mendorong terciptanya budaya belajar yang berkelanjutan, kolaboratif, dan berdampak pada peningkatan kinerja organisasi.



6. Kegiatan selama Ramadhan

Dalam rangka penguatan/peningkatan spiritual sekaligus motivasi untuk menjalani Ramadhan dengan lebih bermakna, produktif, dan penuh keberkahan, BDK Yogyakarta melaksanakan berbagai kegiatan, yaitu

- a. RaBUKU (Ramadan Bersama Ustadz dalam Kajian Umum) setiap Rabu selama Ramadhan dengan tema:
 - Hidup Tanpa Gimmick pada 25 Februari 2026
 - Ruh Ramadhan Adalah Al-Qur'an pada 4 Maret 2026
 - Ramadhan yang Produktif pada 11 Maret 2026
- b. Berbagi Takjil selama Bulan Ramadhan
- c. Penyiapan sahur untuk satpam BDK Yogyakarta
- d. Kultum dan tadarus setelah sholat dzuhur selama Ramadhan



3.6 Evaluasi Peningkatan Kinerja

Secara umum kegiatan pada Balai Diklat Keuangan Yogyakarta telah berjalan sesuai dengan rencana dan beberapa indikasi pengukuran kinerja menunjukkan hal yang positif. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai upaya peningkatan kinerja untuk ke depannya diantaranya:

1. meningkatkan upaya-upaya kolaborasi dan koordinasi dengan semua *stakeholder* dalam rangka meningkatkan sinergi;
2. meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian disertai dengan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan kegiatan pada Balai Diklat Keuangan Yogyakarta sesuai dengan budaya Kementerian Keuangan;
3. mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada, baik berupa manusia, anggaran, maupun sarana dan prasarana untuk dapat meningkatkan kinerja dan kepuasan, terutama dalam penyelenggaraan sistem pelatihan; dan
4. melakukan perbaikan dari hasil evaluasi yang konstruktif, evaluasi konstruktif untuk mendapatkan akar permasalahan dan menghasilkan rekomendasi yang akurat serta menyelesaikan masalah untuk mencapai target kinerja yang maksimal.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Balai Diklat Keuangan Yogyakarta triwulan I tahun 2026 menyajikan berbagai realisasi kinerja dan anggaran triwulan I tahun 2026 serta upaya-upaya dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja tersebut. Secara umum capaian indikator kinerja utama menunjukkan hasil yang positif. Seluruh IKU Balai Diklat Keuangan Yogyakarta telah mencapai target yang ditetapkan. Dari segi anggaran, triwulan I tahun 2026 total realisasi anggaran sebesar Rp589.004.073 atau 13,65 % dari pagu.

Secara umum hasil capaian kinerja Balai Diklat Keuangan Yogyakarta triwulan I tahun 2026 sudah sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan, walaupun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala dan permasalahan namun dapat terselesaikan.